

# Peran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam Memediasi Hubungan Koneksi Politik dengan Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan

Anindya Ratna Kartika Hady<sup>1</sup>

Anis Chariri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Correspondences: [anindya.ratna67@gmail.com](mailto:anindya.ratna67@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menguji hubungan antara afiliasi politik dan potensi laporan keuangan yang menyesatkan, serta fungsi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengurangi efeknya bagi perusahaan publik yang menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2019 dan 2020. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* untuk memperoleh data dari 138 perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam melakukan analisis digunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan dipengaruhi secara negatif oleh koneksi politik menurut uji regresi yang telah dilakukan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat memediasi hubungan koneksi politik dengan kecurangan pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Pengungkapan CSR; Kecurangan Laporan Keuangan; Koneksi Politik.

## *Role of Corporate Social Responsibility Disclosure in Mediating Political Connections with Possible Fraudulent Financial Statements*

## ABSTRACT

*The purpose of the study was to examine the relationship between political affiliation and the potential for misleading financial statements, as well as the function of corporate social responsibility disclosure in reducing its effect on public companies that issue sustainability reports in 2019 and 2020. Sampling used purposive sampling to obtain data from 138 companies, publicly traded on the Indonesia Stock Exchange. In conducting the analysis used path analysis. The results show that financial statement fraud is negatively affected by political connections according to the regression test that has been carried out. This study also shows that CSR disclosure can mediate the relationship of political connections with fraudulent financial reporting.*

Keywords: CSR Disclosure; Financial Statement Fraud; Political Connections.

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 6  
Denpasar, 26 Juni 2022  
Hal. 1632-1646

DOI:  
[10.24843/EJA.2022.v32.i06.p18](https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i06.p18)

## PENGUTIPAN:

Hady, A. R. K., & Chariri, A. (2022). Peran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam Memediasi Hubungan Koneksi Politik dengan Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1632-1646

## RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
8 Mei 2022  
Artikel Diterima:  
25 Juni 2022

## PENDAHULUAN

Perusahaan yang beroperasi dalam persaingan ketat tidak selalu menciptakan kinerja yang diharapkan, disisi lain untuk menunjang keberlangsungan perusahaan, manajemen membutuhkan suntikan dana dari investor (Santoso & Surenggono, 2018). Perusahaan yang membutuhkan suntikan dana memungkinkan manajemen melakukan suatu kecurangan ketika kinerja perusahaan kurang baik agar tetap mendapatkan pendanaan dari eksternal. Kerugian akibat adanya kecurangan laporan keuangan merupakan yang terbesar dari semua jenis kecurangan, hingga mencapai USD 39.800 per bulan jika tidak segera ditemukan (ACFE, 2020). Selain itu menurut survei dari RSM Indonesia, 80 persen responden berpendapat tentang bahaya perusahaan selama pandemi COVID-19 mengatakan bahwa kecurangan meningkat secara tajam selama masa tersebut (Liputan6.com, 2020). Berdasarkan uraian fenomena diatas, alasan pemilihan tema tersebut karena adanya fenomena terkait kerugian kecurangan laporan keuangan yang besar dan dapat merugikan negara.

Selain itu, salah satu masalah yang muncul dan memerlukan perhatian dalam kecurangan laporan keuangan adalah adanya koneksi politik di dalam perusahaan yang dapat melakukan kecurangan laporan keuangan, karena hal ini dapat berdampak pada tindakan kecurangan perusahaan. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk menentukan pengaruh koneksi politik terhadap kemungkinan laporan keuangan, masih banyak inkonsistensi dalam temuannya. Penelitian Gross *et al.*, (2016) dan (Chaney *et al.*, 2011) hubungan politik telah terbukti memiliki efek menguntungkan pada kemungkinan laporan keuangan. Sedangkan, Wang *et al.*, (2017) dan (Guedhami, *et al.*, 2014) ikatan politik ditemukan memiliki efek merugikan pada kemungkinan laporan keuangan.

Karena inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya, peneliti mengkaji ulang dampak koneksi politik terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Hubungan politik seharusnya bukan variabel yang berdiri sendiri, dan dampaknya terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan dapat diubah oleh faktor lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hubungan politik pada kecurangan laporan keuangan dan peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai faktor mediasi antara keduanya.

CSR diduga berfungsi sebagai elemen mediasi, karena personel perusahaan yang terkait secara politik dapat menegakkan aturan pemerintah secara ketat, memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan dan menghindari hukuman dengan tidak melakukan kecurangan laporan keuangan di dalam perusahaan (Wang *et al.*, 2017). Berbagai peraturan tersebut ditetapkan untuk memantau keberlangsungan perusahaan, termasuk bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban sosialnya (Wang, *et al.*, 2018). Perusahaan akan memprioritaskan penerapan peraturan yang paling ketat terlebih dahulu, sebelum berfokus pada meminimalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Peneliti tertarik dengan peran pengungkapan CSR dalam memediasi pengaruh koneksi politik terhadap risiko kecurangan laporan keuangan.

Secara umum, penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan telah banyak dilakukan di berbagai sektor industri. Studi ini dilakukan pada perusahaan *go public* dengan pertimbangan adanya kecurangan laporan keuangan oleh beberapa

perusahaan *go public*. PT. Garuda Indonesia tahun 2018 mengakui pendapatan yang masih menjadi utang. Hal ini mengakibatkan PT. Garuda mengalami peningkatan pada laba perusahaan (<https://economy.okezone.com>). Selain itu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Hanson International terlibat dalam kecurangan laporan keuangan dengan mengubah laporan keuangan.

Penelitian ini akan melihat tiga isu: pengaruh koneksi politik pada kemungkinan kecurangan laporan keuangan, pengaruh koneksi politik pada pengungkapan CSR, dan pengaruh koneksi politik pada kemungkinan kecurangan laporan keuangan yang dimediasi oleh pengungkapan CSR. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi secara praktis dalam memberikan bahan pertimbangan bagi investor dalam memberikan suntikan dana untuk perusahaan dengan tidak hanya memperhatikan laporan keuangan saja, tetapi harus memperhatikan peran sosial perusahaan untuk pemangku kepentingan dan evaluasi bagi pemerintah untuk memperketat peraturan terkait koneksi politik yang ada dalam perusahaan. Bersamaan dengan itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan dan mengoptimalkan ikatan politik. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat berkontribusi memberikan bukti nyata pengaruh koneksi politik terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan dan peran pengungkapan CSR dalam memediasi pengaruh tersebut. Lebih lanjut, penelitian juga diharapkan dapat menambah literatur akuntansi forensik dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

*Fraud* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan diakui berpotensi menguntungkan pelaku fraud sekaligus merugikan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan dapat melakukan kecurangan dengan terlibat dalam salah satu dari tiga jenis dasar kecurangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan aset, atau kecurangan laporan keuangan (ACFE, 2020). Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan buruk yang merugikan pengguna informasi, khususnya investor, akibat penyajian informasi yang tidak benar oleh perusahaan (Harrison & Wicks, 2013).

Sedangkan perusahaan dianggap memiliki hubungan politik jika pejabat senior atau pemegang saham terbesar adalah anggota parlemen atau menteri/kepala negara, dan/atau jika perusahaan memiliki hubungan kuat dengan penguasa, dan/atau jika perusahaan memiliki jaringan politik (Faccio, 2006). Indonesia adalah pasar berkembang dengan sejarah ikatan politik yang signifikan dalam bisnis, karena stabilitas politik negara dan keberhasilan pemerintah dalam menanggapi permintaan pasar telah berfluktuasi (Harymawan & Nowland, 2016). Perusahaan yang memiliki ikatan politik di Indonesia sangat bergantung pada pendapatan yang dihasilkan oleh koneksi tersebut (Fisman, 2001). Perusahaan dengan koneksi politik dapat menuai banyak manfaat, termasuk memfasilitasi perolehan sumber daya penting dan dukungan pemerintah.

Peraturan pemerintah telah dibuat untuk memantau keberlanjutan perusahaan, termasuk bagaimana menjalankan tanggung jawab sosialnya (Wang, Reimsbacha, *et al.*, 2018). Akibatnya, perusahaan didesak untuk mengeluarkan laporan tanggung jawab sosial sebagai sarana untuk mematuhi. Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk UU BUMN 19/2003, UU Penanaman Modal 25/2007, UU

Perseroan Terbatas 40/2007, dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara 4/2009. Batu bara. Selain sebagai persyaratan perundang-undangan, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), terutama PP 23/2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hal ini juga diatur dalam beberapa Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Peraturan Menteri Sosial Peraturan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Akibatnya, perusahaan diminta untuk memberikan laporan tanggung jawab sosial untuk menunjukkan kepatuhan.

Perusahaan dengan ikatan politik yang kuat biasanya memiliki sejumlah keuntungan, termasuk akses lebih cepat ke pinjaman bank, akses istimewa ke kontrak pemerintah, dan kemampuan untuk menyelamatkan pemerintah selama masa kesulitan keuangan (Chaney *et al.*, 2011). Akibat adanya beberapa keuntungan tersebut, perusahaan akan lebih memilih untuk meminta bantuan pemerintah ketimbang harus melakukan kecurangan laporan keuangan yang akan berisiko tinggi jika dilakukan. Perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan akan menghadapi konsekuensi yang berat; akibatnya, perusahaan dengan ikatan politik harus menghindari melakukan kecurangan laporan keuangan untuk menghindari sanksi. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Guedhami, *et al.*, 2014) dan (Wang *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik memiliki efek merugikan pada kemungkinan laporan keuangan yang menyesatkan.

H<sub>1</sub>: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

Praktik CSR yang didukung oleh inisiatif politik dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif (Li *et al.*, 2019). Untuk mencapai keunggulan kompetitif ini, tanggung jawab sosial perusahaan akan digunakan oleh eksekutif untuk mengontrol pengaruh dan legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Adanya koneksi Politik dan kegiatan terkait dapat membantu perusahaan dengan mengurangi ketidakpastian lingkungan, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cheng *et al.*, 2017) (Bianchi *et al.*, 2019) (Wang, *et al.*, 2018) menegaskan bahwa koneksi politik menguntungkan pengungkapan CSR.

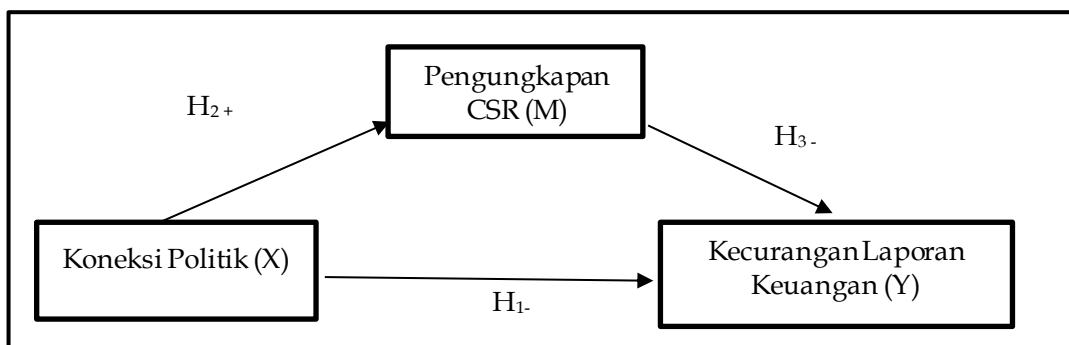
H<sub>2</sub>: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Banyak pembatasan pemerintah telah diberlakukan untuk mengatur keberlanjutan perusahaan, termasuk bagaimana mereka memenuhi tanggung jawab sosial sebagaimana didefinisikan oleh berbagai undang-undang pemerintah. Selain itu, Reimsbach, *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkait secara politik dapat memperoleh manfaat dari akses preferensial ke sumber daya pemerintah. Perusahaan ini mungkin lebih diawasi secara ketat dan lebih mungkin untuk mematuhi undang-undang pemerintah, mengurangi kemungkinan laporan keuangan yang menyesatkan. Menurut Ang (2013), koneksi politik yang dipegang oleh pejabat perusahaan mungkin memaksa perusahaan

untuk mematuhi undang-undang pemerintah yang lebih besar. Dengan demikian, perusahaan dengan ikatan politik dianggap mampu menegakkan undang-undang pemerintah yang ketat untuk memastikan bahwa perusahaan menerima informasi berkualitas tinggi dan kecurangan laporan keuangan diminimalkan (Guedhami, A, *et al.*, 2014).

Guna mengurangi kemungkinan perusahaan membuat laporan keuangan palsu, perlu dipertimbangkan bagaimana perusahaan dengan koneksi politik dapat menerapkan peraturan seperti tanggung jawab sosial perusahaan di suatu negara. Ini akan membantu memastikan bahwa perusahaan tidak membuat laporan keuangan palsu.

H<sub>3</sub>: Pengungkapan CSR dapat memediasi pengaruh koneksi politik dengan kemungkinan kecurangan laporan keuangan



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2021

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengevaluasi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki *sustainability report* (BEI). 138 perusahaan akan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dari total populasi penelitian 214. Perusahaan yang secara konsisten menghasilkan laporan keberlanjutan yang dapat diakses untuk 2019-2020 yang menyertakan data pada semua variabel penelitian memenuhi persyaratan sampel. Data penelitian ini berasal dari data kuantitatif sekunder berupa annual report dan sustainability report periode 2019 - 2020 yang dapat diakses melalui website resmi BEI dan website perusahaan masing-masing. Periode penelitian dua tahun dipilih karena laporan keuangan palsu tumbuh sepanjang periode waktu tersebut, mengakibatkan peningkatan kerugian negara.

Tabel 1. Pehirungan Jumlah Sampel

No.	Penjelasan	Total Perusahaan
1.	Perusahaan tidak konsisten dalam mempublikasi laporan keberlanjutan tahun 2019-2020	(58)
2.	Perusahaan dengan data terkait variabel penelitian tidak lengkap	(18)
3.	Perusahaan <i>go public</i> mempublikasi laporan berkelanjutan tahun 2019-2020	214
Total Sampel Penelitian		138
Total Sampel Populasi (%)		64%

Sumber: Data Penelitian, 2021



Kecurangan laporan keuangan adalah variabel dependen dalam penelitian ini, yang digambarkan sebagai efek negatif dan merusak pada pengguna informasi, khususnya investor, sebagai akibat dari penyajian informasi perusahaan yang miring (Harrison & Wicks, 2013). Model Beneish M-Score, yang dikembangkan oleh banyak peneliti dan dinyatakan dalam rumus berikut, akan digunakan untuk memproksi variabel (Beneish, 1997) :

$$M\text{-Score} = -4,84 + 0,920DSRI + 0,528GMI + 0,404AQI + 0,892SGI + 4,697TATA \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

$$DSRI = \frac{Piutang\ Usaha\ (t)\ / \ Penjualan\ (t)}{Piutang\ usaha\ (t-1)\ / \ Penjualan\ (t-1)}$$

$$GMI = \frac{Laba\ kotor\ (t-1)\ / \ Penjualan\ (t-1)}{Laba\ kotor\ (t)\ / \ Penjualan\ (t)}$$

$$AQI = \frac{(Total\ asset\ (t) - Asset\ lancar\ (t) - PP\&E\ (t))\ / \ Total\ asset\ (t)}{(Total\ asset\ (t-1) - Asset\ lancar\ (t-1) - PP\&E\ (t-1))\ / \ Total\ asset\ (t-1)}$$

$$SGI = \frac{Penjualan\ (t)}{Penjualan\ (t-1)}$$

$$TATA = \frac{Laba\ usaha\ (t) - Arus\ kas\ dari\ aktivitas\ operasi\ (t)}{Total\ Asset\ (t)}$$

Jika Beneish M-Score perusahaan melebihi -2,22, maka diklasifikasikan memiliki probabilitas tinggi untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan skor yang kurang dari -2,22 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki probabilitas kecurangan laporan keuangan yang rendah.

Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah koneksi politik. Koneksi politik dikaitkan dengan kecenderungan bisnis untuk memiliki hubungan politik atau mencari keintiman dengan politisi atau pemerintah. Terkait dengan politisi adalah perusahaan di mana satu atau lebih pemegang saham utama atau pejabat tinggi, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, adalah: (a) anggota parlemen suatu negara, (b) menteri atau kepala negara, atau (c) terkait erat dengan individu yang memegang posisi pemerintahan (Faccio, 2006). Menurut Faccio (2006), variabel ini merupakan variabel dikotomis (kategoris), digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan memenuhi salah satu dari ketiga kriteria diatas atau tidak. Jika sebuah perusahaan tidak memenuhi salah satu dari ketiga kriteria, nilai 0 diberikan.

Menurut Guthrie dan Parker, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan variabel mediasi dalam penelitian ini, dapat dicirikan sebagai mekanisme bagi perusahaan untuk menghasilkan, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi ekonomi dan politik mereka. Pengukuran pengungkapan CSR dilakukan dengan menggunakan Standar GRI yang lebih banyak digunakan sebagai acuan, menggunakan pendekatan penilaian yang pada dasarnya bersifat dikotomis untuk setiap item dalam instrumen penelitian, dengan skor 1 menunjukkan pengungkapan dan 0 menunjukkan non-pengungkapan. Setelah menambahkan skor untuk setiap item, skor total untuk perusahaan ditentukan sebagai berikut untuk menghasilkan indeks CSR akhir.

$$CSRDI_j = \frac{\sum_{t=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

CSRDI<sub>j</sub> = indeks pengungkapan sosial perusahaan,

X<sub>ij</sub> = 1 bila item diungkapkan, 0 bila tidak diungkapkan. Sehingga =  $0 \leq \text{CSRDI}_j \leq 1$

n<sub>j</sub> = Total item diharapkan bagi perusahaan. n<sub>j</sub>: 89 item, berdasarkan pedoman GRI Standards diatas tahun 2017

Penelitian ini memiliki 3 (tiga) variabel yang saling berhubungan yakni koneksi politik yang mewakili variabel independen, pengungkapan CSR yang mewakili variabel mediasi, dan kecurangan laporan keuangan yang mewakili variabel dependen. Ketiga variabel akan dianalisis menggunakan teknik path analysis yang merupakan pengembangan teknik regresi yang dapat memberikan penafsiran kausalitas antar variabel. Pada taraf signifikansi (*alpha*) 5%, proses analisis data dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistic 26. Berikut adalah representasi dari persamaan analisis jalur:

$$\text{CSRDI} = \alpha + p_2\text{PC} + e_1 \dots \dots \dots (3)$$

$$\text{Fraud} = \alpha + p_1\text{PC} + p_3\text{CSR} + e_2 \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan:

CSRDI = *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Fraud = *Fraud*

PC = *Political Connections*

e = *Error* atau nilai residual

p1 = *Path coefficient* Fraud terhadap PC

p2 = *Path coefficient* CSR terhadap PC

p3 = *Path coefficient* Fraud terhadap CSRDI

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimulai dengan analisis statistik deskriptif untuk menemukan sifat data dengan menghitung minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk semua variabel, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis statistik eksplorasi untuk menentukan sifat data.

**Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif**

	<i>Continuous variable</i>					
	N	<i>Minimal</i>	<i>Maximal</i>	<i>Median</i>	<i>Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>
CSR	138	0,022	0,888	0,297	0,326	0,169
SIZE*	138	21,974	36,733	30,932	30,899	2,331
LEV*	138	0,126	0,961	0,607	0,576	0,228
PROF*	138	-0,096	0,416	0,024	0,039	0,069
<i>Dichotomous Variables</i>						
	N	Value 1	(%)	Value 0	(%)	
FRAUD	138	59	43%	79	57%	
PC	138	84	61%	54	39%	

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 2, jumlah data perusahaan publik yang memiliki ikatan politik pada tahun 2016-2017 adalah 84 dari total 138 data (61 persen), sedangkan jumlah data perusahaan yang tidak memiliki ikatan politik adalah 54 (39 persen). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi perusahaan *go public* yang terhubung secara

politik lebih besar, atau bahwa sebagian besar bisnis dapat menjalin hubungan (jaringan) dengan pemerintah.

Kecurangan laporan keuangan, sebagaimana dievaluasi oleh Benish M-Score (FRAUD), ditunjukkan di 59 (43 persen) perusahaan *go public*, sementara data tentang perusahaan yang tidak disarankan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan adalah 79. (57 persen). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perusahaan publik yang dituduh mengajukan laporan keuangan palsu biasanya sangat besar, seperti yang ditunjukkan pada tabel.

Pengungkapan CSR yang diukur menggunakan indikator *Global Reporting Indeks Standards* (CSR) Nilai rata-rata lebih dari nilai median pada perusahaan publik, menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai median. Menurut temuan ini, sebagian besar perusahaan sampel memberikan pengungkapan yang wajar tentang tanggung jawab sosial mereka. Karena standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, distribusi data CSR lebih seragam dari rata-rata.

Pengujian hipotesis tradisional kemudian dilakukan, yang merupakan salah satu kebutuhan untuk pemodelan dan pengembangan regresi. Metode uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Perlu dicatat bahwa penelitian ini terdiri dari data variabel dikotomi (0 dan 1) untuk ikatan politik dan kecurangan laporan keuangan yang dapat dihilangkan dari perhitungan untuk menentukan normalitas variabel. Berikut ini adalah spesifikasi penelitian yang mengkaji asumsi normalitas pada kedua model tersebut:

A. Model 1 ( $FRAUD = \alpha + \beta_1 PC + \beta_2 Size^* + \beta_3 Lev + \beta_4 Prof^* + e$ )

B. Model 2 ( $CSR = \alpha + \beta_1 PC + \beta_2 Size^* + \beta_3 Lev + \beta_4 Prof^* + e$ )

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov - Smirnov Model 1**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		138
Normal	<i>Mean</i>	0,000
Parameters <sup>a,b</sup>	<i>Std. Deviation</i>	0,287
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,171
	<i>Positive</i>	0,135
	<i>Negative</i>	-0,171
<i>Test Statistic</i>		0,171
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,000 <sup>c</sup>

Sumber: Data Penelitian, 2021

Pengujian data dilakukan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,171 dan taraf signifikansi 0,000 yang lebih kecil atau sama dengan 0,05 yang ditentukan oleh uji Kolmogorov-Smirnov. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang berdistribusi regular. Model 1 penelitian ini bergantung pada sejumlah besar variabel dikotomis, yang memungkinkan untuk maju ke tahap berikutnya meskipun fakta bahwa tes ini tidak sesuai dengan prosedur biasa.

Pada Tabel 4, nilai Kolmogorov-Smirnov untuk pengujian data adalah 0,057, dengan ambang batas signifikansi 0,200, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut sudah lebih dari 0,05, seperti yang dinyatakan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel mengikuti distribusi yang teratur. Uji glejser digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada kedua model saat melakukan uji heteroskedastisitas.



**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Model 2**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		138
Normal	<i>Mean</i>	0,000
Parameters <sup>a,b</sup>	<i>Std. Deviation</i>	0,086
<i>Most Extreme</i>	<i>Absolute</i>	0,057
<i>Differences</i>	<i>Positive</i>	0,057
	<i>Negative</i>	-0,057
<i>Test Statistic</i>		0,057
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200 <sup>c</sup>

Sumber: Data Penelitian, 2021

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 dan 2**

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>			
Model		B	Standard Error	Beta		
1	(Constant)	-0,539	0,387		-1,391	0,166
	PC	-0,054	0,060	-0,127	-0,913	0,363
	Size*	0,029	0,013	0,271	2,185	0,051
	Lev*	-0,299	0,133	-0,311	-2,250	0,056
	Prof*	-0,167	0,503	-0,034	-0,332	0,741
2	(Constant)	-0,004	0,105		-0,042	0,966
	PC	-0,021	0,016	-0,190	-1,312	0,192
	Size*	0,002	0,004	0,088	0,678	0,499
	Lev*	0,009	0,036	0,037	0,255	0,799
	Prof*	-0,001	0,136	-0,001	0,009	0,993

Sumber: Data Penelitian, 2021

Size = Ukuran Perusahaan

Lev = Leverage

Prof = Profitabilitas

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5, masing-masing variabel independen yang diselidiki memiliki tingkat signifikansi (sig) lebih dari 0,05, akibatnya, model regresi 1 dan 2 dalam penelitian ini adalah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi antara kedua model yang dipertimbangkan.

**Tabel 6. Uji Autokorelasi Model 1 dan 2**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,820 <sup>a</sup>	0,673	0,663	0,291	1,515
a. Predictors = (Constant); PC; Size*; Lev*; Prof*					
b. Dependent Variable = FRAUD					
2	0,880 <sup>a</sup>	0,774	0,767	0,087	0,666
a. Predictors = (Constant); PC; Size*; Lev*; Prof*					
b. Dependent Variable = CSR					

Sumber: Data Penelitian, 2021

Nilai Durbin-Watson pada Tabel 6 model 1 tercatat sebesar 1,515, dengan nilai  $d_l = 1,662$  dan  $d_u = 1,781$ , dan nilai Durbin-Watson pada Tabel 6 model 2 tercatat sebesar 1,515. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson lebih kecil dari nilai  $d_u$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi. Berdasarkan Tabel 6, model 2 memiliki nilai Durbin-Watson sebesar 1,666, dengan nilai masing-masing  $d_l = 1,662$  dan  $d_u = 1,781$ . Karena nilai Durbin-Watson lebih kecil dari nilai  $d_u$ , maka disimpulkan terdapat autokorelasi antara kedua variabel. Penelitian ini terutama mengandalkan satu variabel independen utama, yaitu koneksi politik (PC), untuk memastikan bahwa meskipun hasil tes ini tidak sesuai dengan standar, penelitian masih dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya. Uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas pada kedua model dengan cara sebagai berikut.

**Tabel 7. Uji Multikolinearitas Model 1 dan 2**

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PC	0,354	2,822
	Size*	0,442	2,264
	Lev*	0,357	2,802
	Prof*	0,639	1,565
2	PC	0,354	2,822
	Size*	0,442	2,264
	Lev*	0,357	2,802
	Prof*	0,639	1,565

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 7, nilai-nilai toleransi untuk semua variabel penelitian lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, menunjukkan bahwa model ini tidak menunjukkan multikoloniaritas. Setelah pengujian asumsi klasik, hipotesis diuji pada tahap berikutnya. Pengujian hipotesis diawali dengan menguji pengaruh koneksi politik terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan yang mewakili hipotesis pertama ( $H_1$ ). Setelah itu, pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) dengan menguji pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan melihat kemampuan pengungkapan CSR dalam memediasi pengaruh hubungan kedua variabel utama ( $H_3$ ).

Tabel 8 menunjukkan bahwa koneksi politik (PC) memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan, dengan p-value kurang dari 0,05. Menurut Beneish M-Score, memiliki hubungan politik memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap kemungkinan laporan keuangan palsu yang disampaikan. Selanjutnya, koneksi politik (PC) memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap pengungkapan CSR, dengan p-value 0,05. Kehadiran ikatan politik memiliki dampak menguntungkan yang signifikan secara statistik terhadap pengungkapan CSR.

**Tabel 8. Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Standard Error	Beta		
1	(Constant)	2,404	0,542		4,433	0,000
	PC	-0,425	0,084	-0,424	-5,085	0,000
	Size*	-0,047	0,019	-0,186	-2,489	0,014
	Lev*	-0,446	0,186	-0,199	-2,396	0,018
	Prof*	-1,616	0,704	-0,142	-2,296	0,023
2	(Constant)	-0,536	0,163		-3,286	0,001
	PC	0,091	0,025	0,251	3,623	0,000
	Size*	0,025	0,006	0,268	4,322	0,000
	Lev*	0,314	0,056	0,387	5,602	0,000
	Prof*	0,454	0,212	0,111	2,144	0,034

Keterangan:

a. Model 1 ( $FRAUD = \alpha + \beta_1 PC + \beta_2 Size^* + \beta_3 Lev + \beta_4 Prof^* + e$ )

b. Model 2 ( $CSR = \alpha + \beta_1 PC + \beta_2 Size^* + \beta_3 Lev + \beta_4 Prof^* + e$ )

\*Size = Ukuran Perusahaan

\*Lev = Leverage

\*Prof = Profitabilitas

Sumber: Data Penelitian, 2021

**Tabel 9. Hasil Uji Direct Effect (1) dan Indirect Effect (2) (Melalui Mediasi)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Standard Error	Beta		
1	(Constant)	0,292	0,013		21,112	0,000
	PC	0,283	0,019	0,781	14,592	0,000
a. Dependent Variable: CSR						
2	(Constant)	1,031	0,078		13,171	0,000
	PC	-0,599	0,086	-0,598	-6,982	0,000
	CSR	-0,613	0,237	-0,222	-2,591	0,011

a. Dependent Variable: FRAUD

Sumber: Data Penelitian, 2021

Sesuai dengan Tabel 9, uji pengaruh langsung (model 1) mengungkapkan bahwa koneksi politik (PC) memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap pengungkapan CSR, dengan nilai alpha 0,05 atau lebih. Pengujian juga dilakukan dengan melihat pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Temuan tambahan (melalui variabel mediasi). Menurut Tabel 9 dari uji dampak tidak langsung (model 2), koneksi politik (PC) memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan, dengan  $\alpha = 0,05$ , ketika mempertimbangkan potensi kecurangan laporan keuangan.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 9, model 1 memiliki nilai beta PC koefisien unstandardized sebesar 0,283, yang juga dikenal sebagai nilai jalur atau jalur p2. Semua nilai beta signifikan untuk PC = -0,599 dan CSR = -0,613 pada model 2 berada antara 0,000 dan 0,011, yang menunjukkan bahwa keduanya

adalah koefisien tidak terstandarisasi. Nilai ini mewakili jalur p1, sedangkan CSR = -0,613 mewakili jalur p3.

Analisis jalur mengungkapkan bahwa koneksi politik (PC) dapat berdampak langsung pada kecurangan laporan keuangan (Mscore), serta dampak tidak langsung, khususnya dari PC ke CSR (melalui mediasi) kemudian ke Mscore, seperti yang diungkapkan oleh hasil penelitian. Pengaruh langsungnya adalah -0,598 (terstandarisasi), namun pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsung (0,781) dengan (-0,222) = -0,173, yang merupakan hasil kali koefisien langsung dan tidak langsung. Tes Sobel kemudian digunakan untuk menentukan apakah pengungkapan CSR memiliki kemampuan untuk menyelesaikan situasi atau tidak.

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}} \dots \dots \dots (5)$$

$$= \frac{0,283 \cdot (-0,613)}{\sqrt{((-0,613)^2 \cdot 0,019^2) + (0,283^2 \cdot 0,237^2)}} = -2,548$$

Keterangan:

a : *variable regression coefficient* x dengan variabel z

b : *variable regression coefficient* z dengan variabel y

SE<sub>a</sub> : *standard error of estimation* pengaruh variabel x dengan variabel z

SE<sub>b</sub> : *standard error of estimation* pengaruh variabel z dengan variabel y

|−2,548| = 2,548 > 1,96 pada tingkat signifikan secara statistik sebesar 5 persen Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki potensi untuk memediasi dampak hubungan politik terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji H1, koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Semakin kuat ikatan politik perusahaan, semakin kecil kemungkinan laporan keuangan palsu akan terjadi. Karena asimetri pengetahuan, perusahaan dengan ikatan yang kuat mungkin memaksa manajemen untuk menghindari sikap *moral hazard*. Mental hazard moral dihindari karena perusahaan yang terkait dengan politik tunduk pada pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah terhadap perusahaan menimbulkan ketakutan pada perusahaan akibat pola pikir moral hazard. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah dampak ini dan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yang mengurangi risiko menyesatkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dalam kebanyakan kasus, perusahaan dengan hubungan politik yang kuat mendapat manfaat dari berbagai keuntungan, termasuk akses yang lebih cepat ke pinjaman bank, akses yang lebih mudah ke kontrak pemerintah, dan kemampuan untuk ditebus oleh pemerintah pada saat kesulitan keuangan. Sebagai hasil dari manfaat ini, bisnis akan memilih untuk mencari bantuan pemerintah daripada mengambil risiko melakukan laporan keuangan yang menyesatkan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Guedhami, Pittman, et al., 2014) dan (Cheng et al., 2017) menyatakan bahwa hubungan politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan laporan keuangan tidak jujur.

Selain itu, temuan uji H2 penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan politik memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Semakin banyak koneksi politik perusahaan, semakin besar pengaruhnya untuk tujuan membangun kepercayaan dan memperoleh legitimasi. Koneksi politik perusahaan yang kuat dapat meningkatkan kesadarannya akan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Koneksi politik dan aktivitas terkaitnya dapat menguntungkan bisnis dengan mengurangi ketidakpastian lingkungan, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Bisnis yang terhubung secara politik akan memanfaatkan kemampuan mereka untuk memenuhi tujuan pemangku kepentingan mereka, dan dipandang sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cheng et al., 2017) (Bianchi et al., 2019) dan (Wang, Reimsbach, et al., 2018) hal ini menunjukkan bahwa ikatan politik berpengaruh positif dan cukup besar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selanjutnya, temuan uji H3 menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpotensi untuk mengurangi pengaruh koneksi politik terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Akibatnya, sementara koneksi politik tidak secara langsung mempengaruhi kemungkinan kecurangan laporan keuangan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan yang terhubung secara politik dapat menerapkan aturan negara, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, untuk mengurangi kemungkinan perusahaan terlibat dalam kecurangan laporan keuangan.

Ikatan politik perusahaan dengan pemerintah melalui hubungan dengan pemegang jabatan struktural akan terwujud secara langsung dalam operasi bisnis dan biasanya akan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti yang diharapkan pemangku kepentingan. Berbagai peraturan pemerintah telah dibuat untuk mengatur keberlanjutan bisnis, termasuk bagaimana mereka menangani tugas sosial mereka. Selain memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya pemerintah, perusahaan dengan koneksi politik juga dapat dikenakan peraturan yang lebih ketat, membuat mereka cenderung tidak melakukan kecurangan pada laporan keuangan mereka. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki ikatan politik dianggap mampu menegakkan undang-undang pemerintah yang ketat untuk memastikan bahwa bisnis menerima informasi berkualitas tinggi dan laporan keuangan palsu diminimalkan.

## **SIMPULAN**

Hubungan politik memiliki dampak negatif pada kemungkinan kecurangan laporan keuangan, dampak positif pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan kemampuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengurangi dampak koneksi politik pada kecurangan laporan keuangan semuanya terbukti benar menurut temuan studi. Pengungkapan CSR harus diminta dari perusahaan dengan ikatan politik yang signifikan; itu dapat membantu perusahaan menghindari pengajuan laporan keuangan palsu.

Penelitian ini menggunakan sejumlah variabel independen yang terbatas, yang semuanya terbatas pada satu, yaitu hubungan politik, yang merupakan



faktor internal perusahaan. Seperti yang kita ketahui, koneksi politik tidak berperan dalam seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan. Mengumpulkan informasi sekunder mengenai koneksi politik yang sulit diperoleh selama proses pengumpulan data, serta melakukan analisis pasca pengumpulan data, merupakan komponen penting dari proses penelitian. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa laporan tahunan saja tidak cukup untuk mengumpulkan informasi ini; namun, karena penelitian ini mengandalkan data sekunder, dan karena terbatasnya ketersediaan informasi melalui berbagai media, serta kompleksitas yang melekat dalam menafsirkan koneksi politik, salah satu keterbatasan studi ini adalah mengandalkan koneksi politik yang kompleks.

Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan menggunakan beberapa variabel bebas lainnya seperti kemungkinan penyebab faktor kecurangan laporan keuangan dari sisi eksternal perusahaan. Selain itu, Periode penelitian tentang koneksi politik akan lebih baik ditambah, misalnya dalam rentang waktu 5 tahun sesuai dengan jangka waktu suatu periode kepemimpinan presiden tertentu di Indonesia.

## REFERENSI

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*.
- Beneish, M. (1997). Detecting GAAP Violation: Implications for Assessing Earnings Management Among Firms With Extreme Financial Performance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 271–309.
- Bianchi, M. T., Monteiro, P., Azevedo, G., Oliveira, J., Viana, R. C., & Branco, M. C. (2019). Political connections and corporate social responsibility reporting in Portugal. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1203–1215. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0111>
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Cheng, Z., Wang, F., Keung, C., & Bai, Y. (2017). Will Corporate Political Connection Influence the Environmental Information Disclosure Level? *Journal of Business Ethics*, 143(1), 2019–2221. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2776-0>
- Faccio, M. (2006). *Politically Connected Firms*. 96(1)(1999), 369–386.
- Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. *American Economic Review*, 91(4), 1095–1102.
- Gross, C., Königsgruber, R., Pantzalis, C., & Perotti, P. (2016). The financial reporting consequences of proximity to political power. *Journal of Accounting and Public Policy*, 35(6), 609–634. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.007>
- Guedhami, O., A, J., Pittman, & Saffar, W. (2014). Auditor Choice in Politically Connected Firms. *Journal of Accounting Research*, 52(1), 107–162. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12032>
- Guedhami, Pittman, & Saffar. (2014). Auditor Choice in Politically Connected Firms. *Journal of Accounting Research*, 52(1), 107–162. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1681459>

- Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2013). Stakeholder Theory, Value, and Firm Performance. *Business Ethics Quarterly*, 23(1), 97-124. <https://doi.org/10.5840/beq20132314>
- Harymawan, I., & Nowland, J. E. (2016). Political connections and earnings quality : How do connected firms respond to changes in political stability and government effectiveness ? *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 339-356.
- Li, X., Bon, J., Haibin, K., & Yangxin, W. (2019). Corporate Social Responsibility and Financial Fraud : The Moderating Effects of Governance and Religiosity. *Journal of Business Ethics*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04378-3>
- Santoso, N. T., & Surenggono. (2018). Predicting Financial Statement Fraud with Fraud Diamond Model of Manufacturing Companies Listed in Indonesia. *State-of-the-Art Theories and Empirical Evidence*, May. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-6926-0>
- Wang, Z., Chen, M., Lung, C., & Zheng, Q. (2017). Managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 36(2), 141-162. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.004>
- Wang, Z., Reimsbach, D., & Braam, G. (2018). Political embeddedness and the diffusion of corporate social responsibility practices in China: A trade-off between financial and CSR performance? *Journal of Cleaner Production*, 198, 1185-1197. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.116>
- Wang, Z., Reimsbach, D., & Braam, G. (2018). Political embeddedness and the diffusion of corporate social responsibility practices in China: A trade-off between financial and CSR performance? *Journal of Cleaner Production*, 198, 1185-1197.